KETIKA KEKUASAAN KEHILANGAN INTEGRITAS: REFLEKSI KEPEMIMPINAN DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI KUOTA HAJI

Muhammad Rafi – Mahasiswa Universitas Siber Asia

Pendahuluan

Kepemimpinan bukan hanya mengenai jabatan, kekuasaan, ataupun kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Lebih jauh dari itu, kepemimpinan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap orang lain yang memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan publik.

Persoalan mengenai kepemimpinan kembali menjadi perhatian masyarakat setelah munculnya kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tambahan kuota haji tahun 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 11 Agustus 2026, jaksa mendakwa adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Dakwaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Fenomena Dugaan Korupsi Kuota Haji

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kasus ini berawal dari pengelolaan tambahan kuota haji Indonesia tahun 2023–2024. Dalam sidang dakwaan pada 11 Agustus 2026, jaksa menyebut bahwa Yaqut didakwa bersama beberapa pihak lain terkait pengisian kuota haji khusus tambahan yang menurut jaksa tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut dakwaan jaksa, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41. Jaksa juga menyebut adanya dugaan penerimaan uang oleh Yaqut sebesar USD271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar. Informasi tersebut merupakan bagian dari dakwaan dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Persoalan kuota haji menjadi penting karena kuota bukan sekadar angka administratif. Di balik satu kuota terdapat seseorang yang telah menunggu untuk menjalankan ibadah haji. Karena itu, kebijakan mengenai pembagian kuota memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan

Menurut saya, inti persoalan yang dapat kita pelajari dari kasus ini adalah bahwa jabatan dan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang dapat memiliki jabatan tinggi, tetapi belum tentu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik.

Jabatan memberikan seseorang kewenangan, sedangkan kepemimpinan memberikan seseorang tanggung jawab moral. Seorang menteri, misalnya, memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan hanya berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Integritas sebagai Dasar Kepemimpinan

Pemimpin yang baik tidak hanya dituntut memiliki kemampuan membuat keputusan, tetapi juga memiliki integritas. Integritas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara nilai, perkataan, dan tindakan seseorang. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan tetap menjalankan prinsip yang benar meskipun memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerugian korupsi sebenarnya jauh lebih besar daripada nominal uang yang hilang.

Ketika negara mengalami kerugian ratusan miliar rupiah, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber daya negara, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melayani

mereka. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola negara. Ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan, hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi rusak.

Pemimpin Harus Berani Bertanggung Jawab

Kepemimpinan juga berarti keberanian untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Dalam organisasi, seorang pemimpin tidak dapat hanya mengambil sisi keuntungan dari sebuah keputusan dan menghindari konsekuensinya ketika keputusan tersebut menimbulkan masalah.

Seorang pemimpin seharusnya mampu mengatakan, “Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil.” Prinsip tersebut sangat penting dalam pemerintahan. Seorang pejabat publik memiliki posisi yang berbeda dengan masyarakat biasa karena keputusan yang dibuatnya dapat berdampak kepada ribuan bahkan jutaan orang.

Kepemimpinan yang Humanis

Jika dikaitkan dengan MKU Estetika Humanisme, kepemimpinan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai kemanusiaan. Pemimpin yang humanis akan melihat masyarakat bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai manusia dengan harapan, kebutuhan, dan hak.

Dalam konteks haji, seorang calon jemaah bukan hanya sekadar satu kuota. Di balik satu kuota mungkin terdapat orang tua yang telah menabung bertahun-tahun, pasangan suami istri yang ingin beribadah bersama, atau seseorang yang telah menunggu puluhan tahun. Karena itu, keputusan mengenai kuota seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Menurut saya, inilah hubungan kuat antara kepemimpinan dan humanisme. Pemimpin yang baik bukan hanya bertanya, “Apa yang bisa saya lakukan dengan kekuasaan ini?”, tetapi juga “Siapa yang akan terkena dampak dari keputusan saya?”

Kekuasaan dan Godaan Penyalahgunaan Wewenang

Kekuasaan selalu memiliki dua kemungkinan. Kekuasaan dapat digunakan untuk melayani, tetapi juga dapat digunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan integritas.

Persoalan korupsi tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan kebutuhan finansial. Korupsi juga berkaitan dengan integritas, moral, kesempatan, dan pengendalian terhadap kepentingan pribadi. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi generasi muda bahwa jabatan bukanlah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan amanah.

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga amanah tersebut.

Apa yang Bisa Dipelajari oleh Mahasiswa?

Kasus ini relevan bagi mahasiswa karena mahasiswa merupakan calon generasi yang nantinya akan memasuki dunia kerja dan masyarakat. Tidak semua mahasiswa nantinya menjadi pejabat negara. Namun, hampir semua mahasiswa akan berada dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga, atau kelompok masyarakat.

Di dalam organisasi kecil sekalipun, prinsip kepemimpinan tetap berlaku. Misalnya seorang ketua kelompok mendapatkan kepercayaan untuk mengelola uang anggota. Meskipun jumlahnya kecil, prinsipnya sama. Jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan anggota, maka telah terjadi penyalahgunaan kepercayaan.

Dari sini kita dapat memahami bahwa integritas tidak dimulai ketika seseorang menjadi pejabat tinggi. Integritas dimulai dari hal-hal kecil. Jika seseorang terbiasa melakukan kecurangan ketika memiliki kewenangan kecil, kebiasaan tersebut berpotensi terbawa ketika ia memperoleh kewenangan yang lebih besar.

Pendapat Saya

Menurut pendapat saya, kasus dugaan korupsi kuota haji merupakan pengingat bahwa kemampuan memimpin tanpa integritas dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Seseorang dapat memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kecerdasan, pengalaman, dan kemampuan membuat kebijakan. Namun, semua kemampuan tersebut akan kehilangan makna apabila tidak disertai moral dan tanggung jawab.

Pemimpin seharusnya memahami bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya bukan merupakan miliknya sendiri. Kekuasaan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan jabatan publik, seharusnya ia tidak berpikir, “Apa yang bisa saya dapatkan dari jabatan ini?”, melainkan “Apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat melalui jabatan ini?”

Menurut saya, inilah esensi kepemimpinan yang humanis. Kasus ini juga mengajarkan bahwa keputusan pemerintah harus memiliki transparansi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketika terdapat keputusan yang berdampak besar kepada masyarakat, proses pengambilan keputusan harus dapat dijelaskan secara terbuka.

Pada akhirnya, saya percaya bahwa pemimpin yang benar-benar kuat bukanlah pemimpin yang memiliki kekuasaan paling besar, tetapi pemimpin yang mampu menahan dirinya ketika memiliki kekuasaan.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan fenomena aktual yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum, kasus tersebut masih harus melalui proses persidangan untuk menentukan apakah dakwaan yang diberikan kepada terdakwa terbukti atau tidak.

Namun, dari perspektif Leadership: Seni dan Gaya Kepemimpinan, kasus ini memberikan pembelajaran penting mengenai hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, integritas, dan kemanusiaan.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan dan kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin harus memiliki integritas dan menyadari bahwa setiap keputusan yang dibuat dapat memberikan dampak kepada kehidupan orang lain.

Dalam konteks penyelenggaraan haji, keputusan mengenai kuota bukan hanya masalah administratif. Di balik setiap kuota terdapat manusia yang memiliki harapan untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, kepemimpinan yang baik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Sebagai mahasiswa, kita dapat mengambil pelajaran bahwa integritas harus dibangun sejak sekarang. Kepemimpinan bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh menteri, direktur, ketua organisasi, atau pejabat negara. Setiap manusia yang dipercaya mengelola sesuatu sebenarnya sedang belajar menjadi seorang pemimpin.

Pada akhirnya, jabatan dapat memberikan seseorang kekuasaan, tetapi integritaslah yang menentukan apakah kekuasaan tersebut digunakan untuk melayani manusia atau justru merugikan manusia.

Daftar Pustaka

DetikNews. (2026, 11 Agustus). Eks Menag Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 M di Kasus Korupsi Kuota Haji.

ANTARA. (2026, 11 Agustus). Yaqut Cholil didakwa rugikan negara Rp622 miliar di kasus korupsi kuota haji.

DPR RI. (2024). Laporan dan dokumen terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya.